

Analysis Of The Controlling Effectiveness Of Food Traders Case Study Of The Implementation Of Regional Regulation Number 8 Year 2007 In The Kelurahan Cipete Selatan Sub-District Cilandak City Administration Jakarta Selatan

Yuliyanti Arini¹, Indah Wahyu Maesarini^{2*}, Muhammad Ilham Aji Faturahman²

^{1,2,3} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ yuliyantiarini@gmail.com ² indah.wm@stiami.ac.id ³ muhammadilhamaji@gmail.com

*corresponding author
Indah Wahyu Maesarini

ARTICLE INFO

Article history

Received : 08-08-2022

Revised : 10-08-2022

Accepted : 11-08-2022

Keywords

Effectiveness

Controlling Street Vendors

Analysis

Implementation

ABSTRACT

Analysis Of The Controlling Effectiveness Of Food Traders Case Study of The Implementation Of Regional Regulation Number 8 Year 2007 In The Kelurahan Cipete Selatan Sub-District Cilandak City Administration Jakarta Selatan.

This study aims to determine how to analyze the effectiveness of controlling street vendors in the area of South Cipete Village, Cilandak District, South Jakarta. The number of street vendors who use sidewalks and road shoulders makes the South Cipete area look disorganized and untidy so that it interferes with the comfort of users of public facilities in the area, the DKI Jakarta Provincial Government through Satpol PP provides a policy to bring order to the area in accordance with DKI Jakarta Regional Regulation number 8 of 2007 About public order. To analyze the problem of effectiveness in controlling street vendors in the South Cipete sub-district, the researchers used the theory of effectiveness proposed by Lance A. Berger, Martin J Sikora (in Mlangeni, 2017), there are 3 main keys to effectiveness, namely: commitment, competence, and coordinating.

This study used qualitative research methods. To obtain this data using interview techniques, literature study and direct observation of the field. The results of the study show the Analysis of the Effectiveness of Controlling Street Vendors in the South Cipete Village, Cilandak District, South Jakarta.

Based on the analysis of the Coordinating, Commitment, and Competence dimensions by interviewing the selected sources, basically the curbing of street vendors is quite effective, because on average the results of interviews obtained mostly state that controlling street vendors has a positive impact seen from the environment becomes orderly, clean, tidy, comfortable and the sidewalks or streets that originally caused traffic jams before the enforcement of the control at the appointed hour and after returning to their original functions, pedestrians or other vehicles can cross the sidewalks and roads as they should, and the roads become smooth and not traffic jam because the road is wide again

PENDAHULUAN

Salah satu profesi yang dipilih masyarakat, yaitu dengan membuka warung yang memuat kebutuhan sehari-hari tapi dapat berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain yang sering masyarakat kita bilang PKM (Pedagang kecil mandiri). Pedagang kecil mandiri disingkat PKM adalah istilah baru yang sebelumnya lebih kita kenal dengan istilah pedagang kaki lima (PKL), Sesuai dengan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta mulai hari ini tak lagi menggunakan istilah pedagang kaki lima (PKL). Di kutip dari <https://news.detik.com/berita/d-3791272/pemprov-dki-ubah-sebutan-pkl-jadi-pkm-apa-itu>.

Masalah PKM (Pedagang kecil mandiri) juga menjadi momok bagi kota- kota besar di Indonesia, salah satunya pemerintah kota DKI Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta sebagai daerah khusus Ibu Kota menjadi magnet yang besar bagi masyarakat dalam mencari mata pencaharian dengan baik. Kewenangan Pemerintah kota Jakarta dalam menyelenggarakan ketertiban umum diatur dalam Peraturan daerah Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum dalam wilayahdaerah khusus ibu kota Jakarta salah satunya penertiban pedagang kecil mandiri.

Penggunaan ruang publik oleh PKM seharusnya dapat ditertibkan salahsatu cara dengan tindakan relokasi. Sepertihalnya di kawasan wilayah cipete selatan PKM di kawasan ini semakin hari semakin meningkat, mereka menggunakan trotoardan bahu jalan yang berada di kawasan tersebut wilayah cipete selatan selain menyebabkan kemacetan keberadaan PKM tersebut membuat kumuh karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan.

Penertiban yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kelurahan Cipete selatan Kecamatan Cilandak masih belum sesuai dengan yang di inginkan. Adanya kemampuan serta keterampilan pegawai yang tidak merata, serta ketrampilan yang di miliki para pedagang kecil mandiri menjadi salah satu kendala dalam penanganan pedagang kecil mandiri. Kurangnya pengawasan dari petugas sehingga masih ada orang yang secara sembunyi sembunyi memanfaatkan kesempatan. Dari segi masyarakat masih ada yang tidak peduli tentang fungsi dari bahu jalan dan trotoar serta masih egois dengan kepentingan masing masing. Masihbanyaknya kendala-kendala yang di hadapidalam pelaksanaan penertiban.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Administrasi Publik

Administrasi Publik (Public Administration) atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu social yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislative, yudikatif dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan public yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan Negara, dan etikayang mengatur penyelenggara Negara. Sederhananya, Administrasi Publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Kajian administrasi publik ini termasuk mengenai birokrasi, penyusunan, pengimplementasian dan pengevaluasian kebijakan public.

Agustini dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik mengutip pendapat Carl Friedrich yang mengartikan kebijakan sebagai berikut, Kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan- hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. (Friedrich dalam Agustino, 2012).

Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban. Keefektifantentu tidak lepas dari penganalisaan terhadap dua variable yaitu karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan. Pengukuran sejauhmana efektivitas suatu aturan bisa dilihat pada seberapa besar target yang menjadi sasaran ketaatannya yang bisa taat padaaturan tersebut maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalaeftif.

Efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran. Efisiensi dalam menggunakanmasukan akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, yang merupakan tujuan darisetiap organisasi apapun bidang kegiatannya. Hal yang paling rawan adalah apabila efisiensi selalu diartikan sebagai suatu penghematan, karena bisa mengganggu operasi, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi hasil akhir, karena sasarannya tidak tercapai dan produktivitasnya juga setinggiyang diharapkan. Sedangkan menurut Setiap individu maupun kelompok berkomitmen untuk mempelajari interpersonal dan keterampilan berkomunikasi. menurut Lance A. Berger, Martin J sikora (dalam Mlangeni, 2017), ada 3 kunci utama dalam efektivitas yaitu:

- Commitment (motivation)
- Competence (Behavior)
- Coordination (skill)

Ketertiban

Ketertiban adalah suatu keadaan dimanasegala kegiatan dapat berfungsi danberperan sesuai ketentuan yang ada. Sedangkan keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Ketertiban merupakan suatu kondisi dimana suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang di inginkan.

Menurut Dal Bachtiar (2006) ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Kemudian menurut Budi Santoso (2011), ketertiban merupakan komponen untukmenentukan apakah lingkungan sektor kitasudah baik atau kurang, bahkan masih kotor. Untuk membangkitkan kesadaran manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, proses yang paling penting dan harus dilakukan adalah dengan menyentuh hati. Jika proses penyadaran telah terjadi dan perubahan sikap dan pola pikir terhadap lingkungan telah terjadi, maka dapat dilakukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai lingkungan hidup, serta peningkatan keterampilan dalam mengelola lingkungan hidup.

Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan PP nomor 6 tahun 2010 pasal3 tentang Satpol PP, pengertian Satpol PP adalah sebagai berikut : "Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat", lebih lanjut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)bertugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman. Selain penegak perda Satpol PP juga dituntut untuk menegakan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Pedagang kecil mandiri

a. Pengertian

Pedagang kecil mandiri disingkat PKM adalah istilah baru yang sebelumnya lebih kita kenal dengan istilah pedagang kaki lima (PKL), Sesuai dengan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta mulai hari ini tak lagi menggunakan istilah pedagang kaki lima (PKL). Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan mulai hari ini sebutan PKL diubah menjadi PKM alias pedagang kecil mandiri. Di kutipdari <https://news.detik.com/berita/d-3791272/pemprov-dki-ubah-sebutan-pkl-jadi-pkm-apa-itu>.

Pendapat Tulus Haryanto (2010), pedagang kecil mandiri ialah Orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusahadi bidang produksi dan penjualan barang- barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu didalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat tertentu yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.

PKM mempunyai pengertian yang samadengan "hawkers" yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama dipinggir jalan dan trotoar.

b. Karakteristik Pedagang Kecil Mandiri

Sebenarnya ada banyak sekalipengelompokkan jika dilihat dari saran fisiknya, dibawah ini akan dijelaskan beberapa dari pedagang kecil mandiri menurut sarana fisiknya, yaitu : (penelitian oleh Waworoentoe, 1973:24 dalam Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang, RetnoWidjajanti).

- 1) Kios
- 2) Warung Semi Permanen
- 3) Gelaran Atau Alas
- 4) Pikulan Atau Keranjang

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut dosen STIAMI Mulyadi(2020:20) berpendapat bahwa:

“Kualitatif menekankan pada makna dan pemahaman dari dalam (konteks tertentu) dan lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, pendekatan kualitatif menekankan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir”.

Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah merupakan salah satu prosedur penelitian yang mengumpulkan hasil data dari gambaran pada manusia yang dinilai melalui lisan maupun tulisan serta perilaku manusia secara langsung.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan maka digunakan teknik sebagai berikut :

a. Observasi

Menurut Nasution (2015:8) dalam buku yang ditulis oleh Sugiyono (2016:310) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Teknik Observasi Partisipasi aktif, dengan melakukan pengamatan langsung terhadap subjek.

b. Wawancara

Burhan Bungin (2016:67) menyatakan untuk mencapai tingkat pemahaman akan sesuatu fenomena sosial sesuai dengan dunia pemahaman para pelakunya memerlukan cara penggalian data yang handal, disinilah letak relevansi metode atau teknik wawancara mendalam (in depth interview).

c. Analisis Data Primer dan Sekunder

Data primer sebuah data secara langsung diperoleh dari informan (Narasumber). Untuk memperoleh data primer dilakukan penelitian lapangan dari hasil pencatatan dan rekaman wawancara secara bebas maupun terpimpin. Selain itu juga data yang diperoleh dari pencatatan pengamatan (observasi).

d. Dokumentasi yaitu data tercetak yang dihasilkan oleh instansi yang terkait dengan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Berkaitan dengan masalah penertiban pedagang kecil mandiri (PKM) di atas trotoar dan bahu jalan di wilayah Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, penulis melakukan wawancara penelitian dengan 5 orang informan yaitu: Bapak Fuad selaku Lurah Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai Informan 1, Bapak Ahnurul Nas, SH selaku Kasatgas Pol PP Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan selanjutnya di sebut sebagai informan 2, Bapak Heriyanto akademisi kemudian di sebut sebagai informan 3, Ibu Nia selaku warga Cipete Selatan kemudian disebut sebagai Informan 4, Bapak Maman selaku pedagang (PKM) di Cipete Selatan kemudian disebut sebagai informan 5, dengan berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Lance A. Berger, Martin J sikora (dalam Mlangeni, 2017), ada 3 kunci utama dalam efektivitas yaitu:

Commitment (motivation), Competence (Behavior), Coordination (skill) yang di pakai dalam penelitian ini. Dari hasil wawancara yang dilakukan berikut pemaparan hasil wawancara yang di peroleh:

1. Efektivitas Penertiban Pedagang kecil mandiri (PKM) di Wilayah Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - a. Commitment (motivation)
Commitment yaitu suatu sikap setia dan tanggung jawab seseorang terhadap sesuatu, baik itu diri sendiri, orang lain, organisasi, maupun hal tertentu.

- b. Competence
Competence Yaitu suatu keterampilan, pengetahuan, sikap dasar, dan nilai yang terdapat dalam diri seseorang yang tercermin dari kemampuan berpikir dan bertindak secara konsisten.
- c. Coordination
Coordination Adalah sebuah sinkronisasi atau penyelarasan berbagai pihak dalam berkerja secara tertib dan teratur dalam batasan waktu.

Dari keseluruhan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan penertiban PKM di wilayah cipete selatan sudah dapat dikatakan efektif namun masih ada beberapa keputusan yang harus dipertimbangkan guna mengantisipasi munculnya masalah lain, karena dengan di tertibkannya PKM bisa menimbulkan hal negative seperti pengangguran. Untuk mengantisipasi hal hal tersebut pemerintah selain menertibkan harus bisa memberikan solusi terbaiknya.

Pelaksanaan kegiatan bisa dikatakan efektif jika sudah tercapai tujuan dan pelaksanaan kegiatan sudah sesuai prosedur yang ada hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Bapak Heriyanto Akademisi yang peneliti wawancarai pada 19 Maret 2022 yang berpendapat bahwa “Suatu kegiatan bisa di bilang efektif jika ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya atau bisa dikatakan kegiatan tersebut memiliki dampak dan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, dari hasil penelitian yang saya baca ini pelaksanaan penertiban PKM sudah dapat di bilang efektif bila mengacu pada teori Lance A. Berger, Martin J Sikora yang mengatakan ada beberapa kunci sesuatu kegiatan dapat dikatakan efektif, yaitu pelaksanaan penertiban PKM dengan adanya sosialisasi, himbauan, penyediaan tempat relokasi dan telah melibatkan stakeholder yang ada maka bisa di katakan sudah efektif walaupun masih banyak menemui kendala”.

1. Adakah kendala yang dihadapi dalam Penertiban Pedagang kecil mandiri di Wilayah Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan?

Informan 1: Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dari proses penertiban yang dilakukan oleh SatPol PP Kelurahan Cipete Selatan antara lain kurangnya sumber daya manusia yang tidak mencukupi dan sikap loyalitas terhadap tupoksi untuk melakukan pengawasan, sehingga penertiban sulit dilakukan. Tidak adanya anggaran khusus dalam melakukan penertiban, sehingga penertiban tidak berjalan optimal. Kurang memadainya jumlah sarana dan prasarana (lokasi penampungan yang di sediakan oleh UMKM) membuat pelaksanaan penertiban PKM kurang optimal. Sulitnya mencari lokasi untuk merelokasi PKM Serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat (PKM) terhadap aturan yang berlaku menjadi hambatan dalam pelaksanaan penertiban PKM di wilayah cipete selatan.

Informan 2: Kurangnya personil yang tidak sebanding dengan jumlah pelanggar membuat kami selaku petugas yang mempunyai kewajiban menjaga ketertiban dan ketentraman merasa kuwalahan. Kalau rasio personil yang menjaga sebanding dengan luas wilayah, kemungkinan area wilayah cipete selatan bisa di lakukan penjagaan sampai malam hari maka PKM pun bisa kita minimalisir. Selain itu tempat relokasi yang di sediakan pihak Kelurahan dan pihak pelaku usaha untuk menampung PKM yang ada di kawasan Cipete Selatan masih jauh dari kata cukup, tempat relokasi hanya mampu menampung seperempat dari PKM yang ada. Kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang minim menjadi faktor penghambat juga dalam penertiban PKM di wilayah Cipete Selatan.

2. Sejauh mana Upaya yang dilakukan dalam Penertiban Pedagang kecil mandiri Di wilayah Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan

Informan 1: Kami berkoordinasi dengan pihak pelaku usaha dalam pengawasan PKM yang ada diwilayah cipete selatan,

Informan 2: Dalam upaya memenuhi kekurangan personil dalam pelaksanaan penertiban PKM yang ada di wilayah Cipete Selatan kami melibatkan petugas Satpol PP yang ada di tingkat Walikota untuk menutupi kekurangan petugasnya. Dalam pelaksanaan pengawasan kami melibatkan pihak keamanan tempat-tempat usaha yang berada di wilayah cipete selatan, pihak Kecamatan dan Kelurahan dalam hal ini UMKM juga sudah berupaya menyiapkan lokasi relokasi PKM yang ada dengan menggandeng pihak-pihak lain untuk membuka lahan sebagai tempat PKM binaan.

PEMBAHASAAN

Dengan berpijak pada teori yang ada bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai, hal ini memberikan kesesuaian dengan efektivitas penertiban pedagang kecil mandiri oleh satpol PP maka hasil penelitian dan analisis kualitatif dapat diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut :

1. Efektivitas Penertiban Pedagang kecil mandiri (PKM) di Wilayah Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Untuk mengukur suatu kegiatan bisa dikatakan efektif dan tidaknya dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Menurut Lance A. Berger, Martin J sikora (dalam Mlangeni, 2017), ada 3 kunci utama dalam efektivitas yaitu:

a. Commitment (motivation)

Commitment yaitu suatu sikap setia dan tanggung jawab seseorang terhadap sesuatu, baik itu diri sendiri, orang lain, organisasi, maupun hal tertentu. Jika dilihat dari hasil observasi di lapangan dan hasil wawancara dengan beberapa informan, maka dapat di simpulkan, bahwa pelaksanaan penertiban PKM di Wilayah Cipete Selatan sudah cukup efektif. Hal ini dapat di lihat dari kinerja petugas Satpol PP sebagai pelaksana penertiban sudah melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk perwujudan fungsinya yaitu menciptakan ketentraman dan ketertiban. Keseriusan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban tersebut di wujudkan dengan keseriusan dalam pelaksanaan penertiban PKM yang ada di kawasan Wilayah Cipete Selatan, lokasi tersebut sering di keluhkan masyarakat karena banyaknya PKM yang berjualan di atas trotoar dan bahu jalan sehingga mengganggu pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya.

b. Competence

Competence yaitu suatu keterampilan, pengetahuan, sikap dasar dan nilai yang terdapat dalam diri seseorang yang tercermin dari kemampuan berpikir dan bertindak secara konsisten. Dengan pelatihan yang sudah dilakukan oleh petugas Satpol PP maka dari segi Competence pelaksanaan penertiban PKM di Wilayah Cipete Selatan sudah efektif, namun demikian dari kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh PKM yang ada di Wilayah Cipete Selatan sudah semestinya pihak pemerintah menyediakan pelatihan keterampilan bagi PKM tersebut, untuk menghindari mereka kembali lagi setelah di tertibkan. Selain itu pemerintah harus menyediakan tempat relokasi bagi mereka yang cukup memadai, jangan hanya asal di sediakan tempat relokasi tanpa memperhitungkan nilai ekonomisnya bagi PKM yang akan di relokasi.

c. Coordination.

Coordination adalah suatu tindakan pengaturan elemen-elemen yang sangat kompleks agar semuanya bisa terintegrasi dan bisa bekerjasama secara efektif dan harmonis. Sedangkan dalam ilmu manajemen, pengertian dari koordinasi adalah berbagai aktivitas yang dikerjakan dengan tujuan untuk mengintegrasikan tujuan serta rencana kerja yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam semua unsur.

Dalam pelaksanaan penertiban PKM di Wilayah Cipete Selatan petugas Satpol PP telah melaksanakan koordinasi dengan melibatkan pihak pihak lain seperti pelaku usaha sebagai pengelola usaha, tokoh masyarakat sekitar kawasan tersebut serta pihak lain yang memiliki kepentingan bersama. Pelaksanaan coordination dilakukan dalam hal pengawasan pasca penertiban dan untuk menyediakan lokasi relokasi penampungan PKM sebagai bentuk solusi dalam pelaksanaan kebijakan penertiban tersebut.

2. Kendala atau hambatan dalam Penertiban Pedagang kecil mandiri (PKM) di Wilayah Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penertiban pedagang kecil mandiri di Wilayah Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan meliputi:

a. Kurangnya pemahaman dari pedagang mengenai Peraturan Daerah larangan berjualan di atas trotoar dan bahu jalan tersebut walaupun sudah dilakukan sosialisasi langsung maupun tidak langsung kepada kelompok sasaran.

- b. Kurangnya kesadaran atau partisipasi pedagang kecil mandiri di wilayah cipete selatan Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan dalam upaya menciptakan ketertiban.
 - c. Dukungan sumber daya pelaksana kurang, karena jumlah sumber daya manusia yang tidak mencukupi sehingga mempengaruhi kinerja para pelaksana dimana akan terjadi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar pelaksana sehingga dibutuhkan adanya partisipasi dari instansi terkait untuk mencapai keberhasilan.
 - d. Sulitnya menyediakan lokasi relokasi bagi para pedagang kecil mandiri yang memadai, karena jumlah pedagang yang terus bertambah.
3. Upaya yang telah dilakukan dalam Penertiban Pedagang kecil mandiri Di Wilayah Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam upaya mengatasi semakin maraknya pedagang kecil mandiri di kawasan Cipete Selatan pihak Pemerintah dalam hal ini Kecamatan Cilandak dan Kelurahan Cipete Selatan melalui Kasi UMKM telah berupaya memfasilitasi dengan menyediakan tempat relokasi dengan bekerja sama dengan pihak pelaku usaha sebagai pengelola lahan di Wilayah Cipete Selatan. Selain itu, pemerintah Kelurahan Cipete Selatan melalui Satpol PP terus melakukan sosialisasi, pengawasan penjagaan secara rutin. Dengan demikian diharapkan kesadaran para pedagang tentang ketertiban dan kenyamanan semakin tinggi, sehingga tidak perlu sampai dilakukan penertiban.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Efektifitas penertiban pedagang kecil mandiri di wilayah Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak kota administrasi Jakarta selatan efektif, hal ini dilihat dari harapan masyarakat wilayah sekitar Kelurahan Cipete Selatan yang menginginkan trotoar yang ada di sepanjang wilayah Cipete Selatan bersih, rapi dan nyaman. Terbukti dengan Comitmen, Competence dan coordinating dari petugas dalam pelaksanaan penertiban dan sosialisasi serta penyediaan lahan relokasi maka tercipta ketertiban dan kenyamanan di wilayah cipete selatan kini kemacetan dan kesemprawutan berkurang. Ternyata pedagang kecil mandiri dinilai mengurangi kemacetan. Sehingga dianggap sesuai dengan harapan masyarakat sekitar. Efisiensi penertiban pedagang kecil mandiri di wilayah Kelurahan Cipete Selatan. Jika dilihat dari komitmen, competence dan coordinating petugas satpol pp dinilai kurang disetiap kelurahan karena belum memadai dengan jumlah kapasitas pedagang kecil mandiri yang berada di wilayah Kelurahan Cipete Selatan. Kecukupan kinerja dari aparat pemerintah maupun satpol pp telah dikatakan baik.
2. Hambatan yang ada dalam pelaksanaan penertiban PKM guna menciptakan ketentraman dan ketertiban oleh pihak Satpol PP antara lain:
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang adanya peraturan daerah dalam hal ini tentang ketertiban umum.
 - b. Lokasi relokasi yang di sediakan belum mampu memenuhi keinginan para PKM dan tidak mampu menampung seluruh PKM yang ada.
3. Upaya yang telah dilakukan oleh petugas Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban PKM di wilayah Cipete Selatan antara lain:
 - a. Melakukan penertiban berkala dengan melibatkan petugas tingkat Kecamatan sebagai upaya memenuhi kekurangan sumberdaya manusia.
 - b. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan daerah nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum secara langsung kepada masyarakat serta memasang spanduk di wilayah cipete selatan tentang ketertiban umum.

SARAN

Berdasarkan kepada rumusan kesimpulan yang telah diutarakan diatas dan berdasarkan temuan dari hasil penelitian dan observasi yang telah dilakukan penulis mengacu pada hasil kesimpulan, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam meningkatkan pengawasan agar proses penertiban berjalan dengan baik dan lancar disarankan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang ketertiban Umum dan masyarakat dapat melakukan aktifitas dengan aman dan nyaman.

2. Dengan peraturan yang mengatur tentang Pedagang Kecil Mandiri, Pemerintah DKI Jakarta beserta aparat pemerintah harusnya melakukan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan tersebut sebelum menerapkannya melalui media sosial, spanduk-spanduk, sosialisasi secara langsung menggunakan alat pengeras suara saat berpatroli, serta adanya tempat relokasi yang disediakan sehingga tidak terjadi benturan terhadap para pedagang tersebut.
3. Diharapkan pemerintah DKI Jakarta selain menyiapkan tempat untuk relokasi Pedagang Kecil Mandiri harus memberikan keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari usaha atau pekerjaan lain yang lebih layak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Admosudirjo, S. Prajudi. 2014. *Dasar-dasar Administrasi Management dan Office Management*. Jakarta.
- Agus Ahyari. 2014. *Manajemen Produksi*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Agus Sabardi. 2011. *Manajemen Pengantar*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Djati Julitriasa dan John Suprihantoro. 2015. *Manajemen Umum*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Duane P. Schultz dalam Apriyadi. 2017. *Agenda Setting Media Masa*, Bandung Rajawali Pers.
- Ghozali, Imam. 2016.. *Structural Equation Modeling: Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gibson, I & Donnelly, 2014, *Organizations, Behavior, Structure, Processes*, 9 Ed. Richard D. Irwin Inc.
- Handayaniingrat, Soewarno. 2017. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Handoko, T. Hani, 2017. *Menejemen*, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta Ibnu Syamsi. 2014. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Indriyo Soekanto. 2010. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Produksi*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Kartini Kartono. 2014. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV Mandar Maju Keith Davis. 2015. *Perilaku Dalam Organisasi*. Penerbit Erlangga.
- Lubis, H Ibrahim. 2017. *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen* Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2010. *Evaluasi Kinerja Pegawai*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Manullang, 2012. *Manajemen Personal*. Jakarta:Ghalia Indonesia Mardiyana. 2015. *Manajemen Produksi*. Jakarta: Badan Penerbit IPWI
- Mulyadi Mohammad. 2016. *Metode Penelitian Praktis Kualitatif & Kuantitatif*. Jakarta. Publica Press.
- Nawawi Hadari dan Martini Hadari. 2016. *Administrasi Personal Untuk Peningkatan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Haji Masagung.
- Nitisemito Alex S. Nitisemito. 2016. *Manajenen Personal*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nitisemito, Alex. S. 2014. *Manajemen Personal*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ravianto, J. 2010. *Produktivitas dan Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produktivitas.
- Sarwoto. 2010, *Dasar dasar Organisasi Manajemen*. PT. Ghalia Indonesia
- Singodimedjo, MARKUM. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Surabaya : SMMASSudjana, 2012. *Metode Statistika*, Bandung: Tarsito

Suganda, Dann. 2017. *Administrasi Strategi, Taktik dan Teknik Penciptaan Efisiensi*. Jakarta: Intermedia.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta

Jurnal :

- Claire Bénit-Gbaffou. (2016). The politics of street trader organisations in inner cityJohannesburg, post-Operation Clean Sweep.
- Dewi Novianti. (2016). dengan judul “Efektivitas Penertiban Pedagang kecil mandiri DiPusat Perbelanjaan Modern Plaza Bangkinang Kabupaten Kampar.
- Hana Winarti. (2016). Analisis Penanganan Pedagang kecil mandiri Dikecamatan MatramanJakarta Timur.
- Junior Dengah, Novie Pioh, Josef Kairupan. (2017). Dengan judul “Evaluasi KebijakanPenertiban Pedagang kecil mandiri di Kota Manado.
- Maris Gunawan Rukmana. (2020). Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamomg Praja dalamPenertiban Pedagang kecil mandiri di Kota Bandung.
- Paiman Raharjo. (2018). dengan judul “Efektivitas Penertiban Pedagang kecil mandiri(PKM) di Pasar Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan.